

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1996 menjadi titik awal pelaksanaan otonomi daerah dengan mendorong pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, sehingga setiap daerah diharapkan dapat membiayai pembangunan serta pelayanan pada daerah tersebut. Otonomi daerah di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, harus disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari informasi yang telah tertera dalam Laporan Keuangan di setiap pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut berjalan. Laporan keuangan tersebut mencerminkan jalannya kinerja keuangan suatu pemerintahan di daerah tersebut.

Semua elemen masyarakat menginginkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara demokratis, adil, merata serta berkesinambungan yang sudah menjadi kewajiban dan konsekuensi dari otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu

mengelola semua potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012) “Dampak lain dari adanya otonomi daerah adalah semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan”. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat terkait pertanggung jawaban pemerintah dalam kinerja keuangannya, pemerintah daerah diharuskan memberi gambaran yang jelas terkait kinerja yang telah dilakukannya selama masa periode tersebut.

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam sector publik maupun pemerintah, karena keberhasilan otonomi daerah pada suatu daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian lebih terhadap kinerja keuangan daerahnya. Kinerja keuangan merupakan ukuran yang menggunakan indikator keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) “Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam organisasi sektor publik, karena dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja dan evaluasi di masa mendatang”.

Pengukuran kinerja keuangan dimaksudkan untuk membantu serta memperbaiki kinerja suatu pemerintah daerah, pengalokasian sumber daya yang baik, serta pembuatan akan keputusan yang tepat untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas public. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Darmanto (2012) “Kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor finansial. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi suatu kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di suatu daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2012) “Penilaian kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan metode Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan” Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Rasio kemandirian serta faktor lingkungan dan finansial.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kemandirian Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian
1	Kabupaten Banyuasin	7%
2	Kabupaten Empat Lawang	4%
3	Kabupaten Lahat	6%
4	Kabupaten Muara Enim	12%
5	Kabupaten Musi Banyuasin	8%
6	Kabupaten Musi Rawas	7%
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	3%
8	Kabupaten Ogan Ilir	5%
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	15%
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	13%
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4%
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	6%
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	7%
14	Kota Lubuk Linggau	13%
15	Kota Pagaralam	11%
16	Kota Palembang	40%
17	Kota Prabumulih	11%

Sumber : Data diolah LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Peneliti menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tingkat rasio kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan informasi yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Pada table 1.1 terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 menunjukkan masih banyak daerah yang tingkat kemandiriannya berada pada skala kurang-sedang. Tingkat kemandirian tertinggi ada di angka 40% yang dimiliki oleh Kota Palembang, serta teingkat kemandirian terendah ada di angka 3% yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten.kota di Provinsi

Sumatera Selatan ada di tingkat rendah, serta masih belum meratanya tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

*Population* merupakan sekelompok orang ataupun individu yang mendiami suatu wilayah tertentu. *Population* atau jumlah penduduk merupakan faktor lingkungan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patriati (2010) “Jumlah penduduk berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak bagi yang memiliki npwp atau tergolong menengah atas dan pendapatan retribusi yang diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah dan tidak memiliki npwp demi terciptanya pemerataan yang baik, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerahpun juga meningkat, dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga akan semakin baik”

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	2018	
		Jumlah Penduduk	PAD
1	Banyuasin	364260	Rp140,602,072,490
2	Empat Lawang	821528	Rp32,217,492,489
3	Lahat	628661	Rp112,571,296,475
4	Muara Enim	405605	Rp232,468,708,584
5	Musi Banyuasin	400239	Rp210,238,037,284
6	Musi Rawas	640065	Rp106,289,385,326
7	Muratara	846269	Rp30,141,830,710
8	Ogan Ilir	358510	Rp55,362,963,113
9	OKI	670653	Rp235,946,143,259
10	OKU	424774	Rp156,622,053,791
11	OKU Selatan	247544	Rp42,993,134,752
12	OKU Timur	187554	Rp85,235,157,421
13	Pali	190222	Rp74,392,980,925
14	Lubuklinggau	1651857	Rp105,606,815,787
15	Pagaralam	185895	Rp73,600,344,354
16	Palembang	137964	Rp953,302,082,628
17	Prabumulih	229889	Rp90,910,521,066

Sumber : Data diolah BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan yang setiap tahun bertambah, maka penulis menjadi semakin tertarik untuk melihat pengaruh *Population* (jumlah penduduk) pada kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan yang jumlah penduduknya setiap tahun selalu meningkat.

*Size* merupakan faktor *financial* yang juga berhubungan erat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. *Size* dapat diukur dengan berbagai cara antara lain, jumlah karyawan, total asset, total pendapat, dan tingkat produksi. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah. Dalam praktiknya pemerintah daerah harus didukung oleh aset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sumber daya dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Semakin besar nilai aset suatu pemerintah daerah tersebut menggambarkan bahwa semakin produktif dan semakin mandiri kinerja pemerintah daerah (Darmanto, 2012). Dengan adanya ukuran pemerintah daerah yang besar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah tersebut agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik, karena ukuran pemerintah daerah yang besar akan diikuti dengan penyalahgunaan yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agnemas (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat mengelola dengan baik aset yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja modal adalah belanja pemerintah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Nopriani (2019) berpendapat bahwa belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. Ayinde et al. (2015) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal juga dapat ditujukan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Belanja Modal

merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan expenditure yang terdiri belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan public yang baik. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan value for money yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula.

Alasan mendasar penelitian ini dilakukan karena hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti yang terdapat dalam penelitian Darmanto (2012) yang melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variable independen Population, employment, Size, dan leverage. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variable Population dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara untuk faktor employment dan Size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2017) yang melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel independen Population, employment, Size, dan leverage, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variable Population dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara untuk faktor employment dan Size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan variable independen Population, employment, Size, dan leverage.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Antari Ni Putu Gina Sukma, dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) variabel PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja modal berpengaruh negative signifikan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasna Latifah dan Haryanto (2018) yang menghasilkan variabel PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan *operating revenues to total revenues* (tingkat kemandirian), dengan mengambil

sampel laporan keuangan pemerintah daerah dan data dari badan pusat statistik pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan tiga variable independen: *Population*, *Size*, dan Belanja Modal. Maka, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Population*, *Size*, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan maslaah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Population* memiliki pengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah *Size* memiliki pengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Apakah *Population*, *Size*, dan Belanja Modal memiliki pengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penliti membatasi ruang lingkup penelitian pada 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited* yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2014-2018.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Population*, *Size*, dan Belanja Modal berpengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Population*, *Size*, dan Belanja Modal berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi pengaruh *Population, Size*, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang sektor publik serta menambah wawasan dalam peningkatan kemampuan mengalalisis masalah dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah sehingga bisa menjadi alat pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

### 1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang , perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan teknik analisis data



**BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan serta analisa terhadap data-data yang diperoleh dari pengujian deskriptif statistic, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan saransaran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemceahan masalah.